

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Basuki, Sunario, *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia, Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*. Program Spesialis Notariat, FHUI.

Chandra, S, 2005, *sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan DI Kantor Pertanahan*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya (1996)*, Cetakan Kespuluh, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.VI.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.

Nawawi, H, *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Prints, Darwin, 1996, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Prajoto, Edi, 2006, *Anitomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, CV. Utomo, Bandung.

Saleh, K. Wantijk, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudjito, 1987, *PRONA Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3344, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4380, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5252.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kator Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

C. Tesis-Skripsi

Andi Mardani, 2008, Pelaksanaan Pencatatan Dalam Buku Tanah Menurut Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Benedictus Wisnu H. H., 2015, Pelaksanaan Blokir Terhadap Sengketa Pertanahan pada Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Program Studi Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Kabar Cirebon, “Sertipikat Tanah Diblokir, Warga Ampera Tersandera”, <http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/10/sertipikat-tanah-diblokir-warga-ampera-tersandera>, diakses tanggal 08 Desember 2015.